



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG DARMANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **92201**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.644.070.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/78 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/54 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1863 m2 di PURWOREJO, WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1.599 m2 di PURWOREJO, WARISAN Rp. 379.070.000
5. Tanah Seluas 1.937 m2 di PURWOREJO, WARISAN Rp. 325.000.000
6. Tanah Seluas 2.014 m2 di PURWOREJO, WARISAN Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 1880 m2 di PURWOREJO, WARISAN Rp. 290.000.000
8. Tanah Seluas 350 m2 di TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **127.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, LAINNYA Rp. 114.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **22.150.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	641.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.434.220.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.434.220.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.